

B A B II

TINJAUAN TENTANG DEMOKRASI

A. Arti Demokrasi

Demokrasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani "Demokratia"; Demos berarti rakyat; Kratia berarti Pemerintahan. Yaitu pemerintahan dengan pengawasan rakyat dalam arti kata agak lebih sebagai keseluruhan dari pada sebagai kelas, golongan atau perseorangan.¹

Ditinjau dari segi istilah Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Sementara yang lain mengatakan "Demokrasi" (berasal dari bahasa Belanda : Democratie) yang berarti suatu sistem pemerintahan yang mengutamakan pengaruh rakyat dari negara itu.³

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Demokrasi di sini adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat ikut berperan dalam pemerintahan yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Atau dengan istilah lainnya adalah kedaulatan

¹ Ensiklopedi Umum, Yayasan Kenisius, 1973, hal. 301.

² Ensiklopedi Indonesia, Demiliterisasi, Yayasan Kenisius, 1973, hal. 784.

³ Yulius S. et al. Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, Cet. II, 1984, hal. 44.

an berada di tangan rakyat.

Secara teoritis, demokrasi sejak semula mempunyai dua pengertian, yaitu : Demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti materiil.

Demokrasi dalam arti materiil adalah bahwa inti dari demokrasi itu justru terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasarkan kepada pelaksanaan kemerdekaan tiap-tiap individu yang mengaku sebagai warga negara.

Arti demokrasi secara formal hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat yang kemudian menjadi bagian besar dari rakyat. (Volente generale; dari Rousseau), akan tetapi tidak ada batasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.⁴

Dari kedua pengertian tersebut di atas, bahwa yang banyak memberikan pengaruh terhadap pengertian demokrasi dewasa ini adalah pengertian demokrasi materiil. Walaupun demikian tidak dapat meninggalkan sistem demokrasi formal. Karena keduanya saling melengkapi.

Kalaupun dari sudut formal timbul pertanyaan "siapa yang memegang kekuasaan", maka dari sudut materiilnya adalah "bagaimanakah seharusnya kekuasaan itu harus dilakukan sampai di mana". Untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan di mana itu, faktor yang paling utama adalah kemerdekaan dan hak asasi manusia dan penghargaan/penghormatan terhadap setiap manusia.

Jika pengertian ini diterangkan buat jaman seke-

⁴M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Alumni, Bandung, 1981, hal. 73 - 74.

rang, demokrasi adalah suatu susunan masyarakat yang didasarkan pada kemerdekaan politik dan kebebasan rohani bagi rakyat serta pada prinsipnya adanya persamaan hak dari setiap orang terhadap Undang-undang.⁵

Hari Cahyono membagi demokrasi itu menjadi 2 bagian; yaitu demokrasi dalam bentuk sistim dan demokrasi dalam bentuk civil.

Demokrasi dalam bentuk sistim adalah dimana rakyat mempunyai peranan penting dalam pemerintah. Demokrasi dalam bentuk civil; rakyat tidak ikut serta memerintah tetapi mempunyai kebebasan berbicara.⁶

Demikian itulah pengertian demokrasi, semoga pengertian ini dapat memberi gambaran kepada kita tentang Demokrasi Terpimpin.

B. Konsep-konsep Demokrasi

Demokrasi masyarakat Internasional modern tampak berkecenderungan kuat menerima gagasan pokok bahwa pemerintahan diciptakan untuk kepentingan rakyatnya. Demokrasi dianggap sebagai sistim pemerintahan yang paling baik.

Karena sulitnya memberikan penterjemahan tentang demokrasi dalam praktek politik, maka kebanyakan negara hanya mengambil formatnya saja dan memberikan tambahan predikat-predikat tertentu misalnya Demokrasi Liberal, Demokrasi Sentral, Demokrasi Referendum, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila dan lain sebagainya.

⁵ Ibid., hal. 74.

⁶ Cheppy, Idiologi Politik, t.p., t.t., hal.

M

Oleh karena itu M. Amien Rais memberikan patokan patokan teoritik konsepsional demokrasi yaitu :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan sudah tentu tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi lewat representasi (para wakil) yang dipilih rakyat secara bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilu.

2. Persamaan di depan hukum

Negara demokrasi selalu merupakan negara hukum Rule of law harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latarbelakang apapun. Seorang penjahat, pejabat, dan aparat negara, terlepas dari kaliber masing-masing, tidak ada yang kebal hukum. Hukum berlaku universal dalam arti seluruh warga negara dalam wilayah negara berada di bawah yuridiksi hukum positif yang berlaku.

Misalnya; bekas perdana menteri Jepang Tanaka harus masuk penjara sebab korupsi. PM. India Indra Gandhi juga harus masuk penjara akibat pelanggaran hukum. Hal ini terjadi atas tuntutan rakyat dalam demokrasi menuntut persamaan hak di dalam hukum.

3. Distribusi pendapatan secara adil

Konsep ekualitas dalam demokrasi pada dasarnya merupakan konsep yang utuh artinya, tidak boleh persamaan hanya ditekankan disalah satu bidang kehidupan saja, sementara bidang-bidang lainnya ditinggalkan. Secara demikian ekualitas politik dan ekualitas hukum menjadi lengkap bila disertai dengan ekualitas ekonomi.

Demokrasi hanya mempunyai makna bila satu negara terdapat pembagian pendapatan yang adil. Adanya ke-

senjangan antara lapisan kaya dan lapisan miskin menunjukkan jalannya demokrasi itu belum baik.

Tampak konsep distribusi pendapatan yang adil ini merupakan prinsip demokrasi yang tidak boleh diabaikan.

4. Kesempatan pendidikan yang sama

Pendidikan merupakan faktor yang krusial, selain menentukan pekerjaan dan penghasilan juga menentukan status sosial, kekuasaan yang dapat diraih dan dapat dinikmati untuk mengembangkan potensi insan kamil.

5. Dapat macam kebebasan

- a. Kebebasan mengeluarkan pendapat (berbicara)
- b. Kebebasan persurat kabaren
- c. Kebebasan berkumpul
- d. Kebebasan beragama

6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi

Rakyat perlu mengetahui tidak saja kualitas para pemimpinnya, melainkan juga situasi yang selalu berkembang yang mempengaruhi kehidupannya dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahannya, baik bersifat politik, ekonomi, militer, pertahanan dan kesenian, pendidikan dan lain sebagainya.

7. Mengindahkan fatsoen

Demokrasi memiliki fatsoen atau tatakrma politik yang harus selalu diindahkan. Fatsoen politik memang tidak selalu tertulis, akan tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang telah paham tentang nilai-nilai demokrasi.

8. Kebebasan individu

Hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privacy (kehidupan privat).

Seperti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokratis. Hak untuk memiliki pekerjaan, memilih tempat tinggal, memilih bentuk pendidikan dan lain-lain, harus dijamin dalam demokrasi, kecuali kalau sampai merugikan orang lain.

9. Semangat kerjasama

Seperti atau kerjasama di antara para warga negara untuk melesterikan nilai-nilai luhur yang disepakati bersama merupakan prinsip demokrasi yang harus dilengkapi.

10. Hak untuk protes

Yaitu apabila terjadi penyelewengan, rakyat berhak untuk protes.⁷

Di samping 10 kriteria konseptual demokrasi di atas penulis mencoba menambahkan yaitu :

1. Rakyat mempunyai hak untuk mengoreksi jalannya pemerintahan dan apabila jalannya pemerintahan itu kurang lurus atau banyak penyelewengan, maka rakyat berhak untuk menegur dan berhak untuk meluruskannya.

2. Bersuasawarah untuk mencapai suket

Di dalam negara demokrasi, musyawarah merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan. Setiap ada permasalahan penyelesaiannya harus dengan musyawarah.

Mattulada mengatakan bahwa demokrasi itu sebagai suatu konsep dapat dijabarkan ke dalam konsep "kerakyatan" dalam kultur demokrasi kita. Dari sudut ini kita mencoba meletakkan dasar-dasar pemahaman tentang kultur demokrasi dalam masyarakat tradisional kita. Dari

⁷ Lihat Pengantar Amin Rais dalam buku Demokrasi dan Proses Politik, LP 3 ES, Jakarta, 1982, hal.

sana mungkin kita dapat mencari refleksi dengan konsep kerakyatan atau demokrasi kita yang has, dimana ada musyawarah untuk mufakat. Sifat gotongroyong atau cara-cara kekeluargaan dalam mengurus suatu persekutuan hidup termasuk negara.⁸

Suasana kerakyatan yang didukung oleh pribadi pribadi warga masyarakat desa yang saling menghargai, saling membantu dengan ikhlas oleh semangat gotong royong, menunjukkan terpeliharanya hakikat demokrasi yang dinamakan konsep kerakyatan.⁹

C. Pengertian Demokrasi Terpimpin

Setelah kita mengetahui pengertian demokrasi dan konsep-konsep demokrasi secara umum, maka kita dapat menggambarkan bahwa pemerintahan yang menganut sistem demokrasi adalah bahwa semua kekuasaan berada di tangan rakyat. Atau setidaknya-tidaknya rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Sekarang marilah kita bandingkan dengan pengertian Demokrasi Terpimpinnya Soekarno.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam penegasan judul, bahwa arti dari pada Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk-petunjuk yang tertentu. "Yang ketetapanannya diatur dalam ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965".¹⁰

⁸ Seri Prisma, Demokrasi dan Proses Politik, LPJES Jakarta, 1986, hal. 4.

⁹ Ibid., hal. 13.

¹⁰ Insiklopedi Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973, hal. 301.

Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk menentang sifat-sifat Liberal daripada Demokrasi Barat, yang bertentangan dengan asas-asas permusyawaratan untuk mencapai mufakat, sesuai dengan Pancasila. Dalam pelaksanaannya Demokrasi Terpimpin terlalu menonjolkan unsur-unsur pemimpin yang diberi hak untuk mengambil keputusan apabila tidak dicapai mufakat dalam suatu permusyawaratan. Maka dari itu akhirnya meluncur ke arah kediktatoran.¹¹

Menurut pengamatan Soekarno bahwa Demokrasi Liberal sudah tidak dapat lagi diterapkan di Indonesia, karena Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati revolusi yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Masing-masing golongan politik saling berebut keuntungan dan saling mengorbankan yang lain. Maka dari itu Soekarno melihat dan mengatakan bangsa Indonesia harus kuat, harus bersatu dalam negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dan masyarakat adil dan makmur yang akan memberikan kebahagiaan bagi semua warga negara.

Di samping itu Soekarno juga mengamati, bahwa pada masa Demokrasi Liberal rakyat ditunggangi pemimpin, rakyat menjadi alat demokrasi.¹² Maka dari itu akhirnya Soekarno bergerak maju untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin di dalam sistem politik Indonesia.

Adapun definisi tentang Demokrasi Terpimpin, sebagaimana dalam amanat Presiden pada tanggal 22 April 1954, Presiden di sana memberikan beberapa definisi

¹¹ Ibid.

¹² Dikutip oleh Ahmed Syafli Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP 3 ES, Jakarta, 1985, hal. 183.

yang tidak kurang dari 12 definisi yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintah Juanda yang telah disetujui oleh Soekarno. Satu di antaranya mengatakan : "Demokrasi Terpimpin" ialah demokrasi, atau dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.¹³

Dalam kesempatan lain Soekarno menjelaskan "Demokrasi Terpimpin" adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa artinya liberalisme, tanpa otokrasi diktator.¹⁴

Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan musakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh, yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin, mengayomi.¹⁵

Demikian itulah sistem demokrasi menurut Soekarno yang kemudian diikuti oleh UUD 1945 sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Dan Soekarno memberikan kesempatan bahwa pada hakikatnya Demokrasi Indonesia sejak dahulu kala adalah Demokrasi Terpimpin.¹⁶

Dalam kesempatan lain ia mengatakan kepada Mrf Kohn dalam wawancaranya, mengatakan "Demokrasi Tisur" atau lebih persisnya Demokrasi Indonesia didampingi oleh pemimpin".¹⁷

Dengan demikian, bahwa pada pokoknya dengan De-

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., hal. 184.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

sekresi Terpimpin, Soekarno menempatkan dirinya sebagai sesepuh, sebagai ayah dalam keluarga besar rakyat Indonesia, dengan kekuasaan dan segala sesuatunya terpusat pada tangannya.